

Ruang Publik sebagai Wahana Diskursus Lingkungan: Relevansi Pemikiran Jürgen Habermas di Era Krisis Ekologis

Alfonsius Tandang

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
vorlandtandang@gmail.com

ABSTRAK

Krisis lingkungan hidup dewasa ini merupakan persoalan serius seluruh umat manusia. Pencemaran lingkungan, penurunan jumlah keanekaragaman hayati, perubahan iklim yang ekstrem kenyataan yang dialami manusia sebagai akibat dari tindakan manusia yang mengabaikan keberadaan entitas non-manusia. Krisis lingkungan hidup telah berkembang menjadi persoalan kompleks karena menyentuh realitas terdalam manusia serta menyentuh semua aspek keberlanjutan manusia. Manusia dan entitas non-manusia menjalin relasi saling ketergantungan. Manusia sebagai pelaku moral memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga relasi ketergantungan terjalin secara harmonis. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau wadah diskursus yang ideal dan efektif untuk membahas serta mencari solusi yang relevan terhadap krisis lingkungan dewasa ini dalam masyarakat yang kompleks dan demokratis. Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni metode kualitatif melalui studi dan analisis kepustakaan. Penulis mencoba mencari berbagai sumber tertulis mengenai tema yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis juga akan berusaha untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan tema tulisan ini. Kontribusi dari tulisan ini yakni menyiapkan wadah yang ideal bagi partisipasi masyarakat dalam memberikan pemahaman yang ideal serta tindakan yang berkelanjutan. Solusi terhadap krisis lingkungan hidup dewasa ini menjadi tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah komunikasi yang ideal yang memungkinkan nilai-nilai ekologis diperdebatkan, disepakati, dan diinternalisasikan secara kolektif. Ruang publik Habermas menjadi kerangka normatif bagi berlangsungnya diskursus rasional, bebas dominasi, dan inklusif.

Kata Kunci: Ruang Publik; Habermas; Krisis Lingkungan

ABSTRACT

The current environmental crisis has become a serious concern for all humankind. Environmental pollution, the decline in biodiversity, and extreme climate change are realities experienced by humanity as a consequence of human actions that disregard the existence of non-human entities. The environmental crisis has evolved into a complex problem because it touches upon the deepest aspects of human reality and affects all dimensions of human sustainability. Humans and non-human entities are bound by a relationship of mutual interdependence. As moral agents, humans bear a moral responsibility to maintain this interdependent relationship in a harmonious manner. This paper aims to examine an ideal and effective forum for discourse to discuss and seek relevant solutions to today's environmental crisis within a complex and democratic society. The method employed in this study is qualitative, conducted through literature review and analysis. The author seeks to explore various written sources related to the topic discussed in this paper and to analyze relevant literature that aligns with its theme. The contribution of this paper lies in proposing an ideal platform for public participation in fostering an adequate understanding and promoting sustainable action. Solutions to the current environmental crisis must be regarded as a collective responsibility. Therefore, an ideal communicative space is needed—one that enables ecological values to be debated, agreed upon, and internalized collectively. Habermas's concept of the public sphere provides a normative framework for rational, domination-free, and inclusive discourse.

Keywords: Public Sphere; Habermas; Environmental Crisis.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup dewasa ini semakin parah dan kompleks. Cara pandang dan cara bertindak manusia yang mengabaikan entitas non-manusia menjadi akar krisis lingkungan. Perubahan iklim yang ekstrem, pencemaran lingkungan, penurunan jumlah keanekaragaman hayati yang drastis merupakan akibat dari cara pandang dan tindakan manusia. Laporan World Meteorological Organization (2025) menetapkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas dengan peningkatan suhu rata-rata global mencapai 1,55°C di atas tingkat pra industri. Dalam waktu yang bersamaan, laporan IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2025) melaporkan adanya penurunan populasi asli yang signifikan mencapai 20 % serta hilangnya spesies amfibi mencapai 40 %. Data ini menggambarkan krisis lingkungan hidup dengan berbagai aspeknya yang kian memprihatinkan.

Krisis ekologi dewasa ini merupakan persoalan yang kompleks dan bukan sekedar teknis dan politis semata, melainkan telah menjadi persoalan bersama dan isu global yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Bertitik tolak dari fakta ini, keperihatinan terhadap lingkungan mesti mendapat tempat dalam wacana modern. Robert Cox (2010) menjelaskan bahwa wacana lingkungan merupakan cara sistematis berbicara tentang lingkungan untuk menganalisis akar krisis lingkungan dan menentukan solusi yang berkelanjutan. Wacana ekologis semakin penting untuk meningkatkan kesadaran ekologis serta keyakinan kolektif akan masa depan yang pro-lingkungan. Menurut penelitian Bosene pada tahun 2024 bahwa akan adanya peningkatan keyakinan kolektif serta dorongan untuk berperilaku pro lingkungan baik secara individu maupun kolektif. Kesadaran tersebut muncul ketika kerusakan lingkungan hidup semakin nyata, seperti perubahan iklim yang ekstrem (Vestergren et al., 2024).

Wacana dan optimisme akan perubahan melalui peningkatan kesadaran kolektif mesti didukung oleh wadah partisipasi yang ideal untuk meningkatkan kesadaran. Habermas menawarkan konsep ruang publik sebagai wadah ideal untuk membangkitkan kesadaran kolektif melalui pertentangan dan pertautan ide yang rasional. Habermas mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses ke dalam ruang publik. Ruang publik bersifat inklusif. Ruang publik yang ditawarkan Habermas juga memberi kesempatan yang sama kepada setiap peserta untuk menyampaikan argumentasinya. Argumentasi tersebut harus didasari pemahaman yang rasional agar mampu menyakini orang lain. Diskursus dalam ruang publik bersifat intersubjektif untuk mencapai pemahaman bersama (Hardiman, 2009). Ruang publik Habermas terbuka untuk semua isu dalam kehidupan masyarakat. Ruang publik tersebut dapat terwujud menjadi ruang hijau atau ruang publik ekologis.

Dalam konteks ini, menguatnya wacana lingkungan hidup sejalan dengan kebutuhan ruang bersama atau Habermas menyebutnya sebagai ruang publik, ruang pertentangan dan pertautan ide dimana kesadaran ekologis dibangkitkan, diangkat menjadi wacana sosial, dan diterjemahkan menjadi komitmen sosial. Ruang publik menjadi wadah ideal untuk membangkitkan kesadaran ekologis secara individu dan kolektif. Melalui ruang publik, berbagai persoalan lingkungan hidup dan isu keberlanjutan menjadi bahan diskursus dengan menawarkan berbagai cara pandang yang berujung pada konsensus. Konsensus merupakan hasil kesepakatan bersama dalam ruang publik yang lahir dari pertentangan dan pertautan ide dalam ruang publik. Konsensus tersebut akan menjadi tuntutan dan tawaran terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan akan mendapat legitimasi sosial melalui proses yang setara dalam ruang publik. Oleh karena itu, ruang publik Habermas menjadi kerangka normatif yang ideal dan relevan untuk sampai pada tindakan yang berkelanjutan.

REVIEW OF LITERATURE

Karya Aminah Swarnawati, dkk dengan judul “Ruang Publik dan Komunikasi Dialogis Mengenai Konservasi di Taman Nasioanal Kepulauan Seribu” membahas tentang proses pengambilan kebijakan konservasi di pulau Seribu. Aminah Swarnati, dkk mengungkapkan bahwa proses dialog dalam ruang publik, baik ruang publik informal maupun formal berjalan

baik meskipun ada beberapa kendala (Aminah et al., 2018). Penelitian lainnya dari Pera Nurfathiyah dalam Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis membahas tentang diskursus dalam ruang publik antara orang rimba sebagai komunitas lokal dengan pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus dalam ruang publik untuk membahas persoalan ekologis berjalan dengan baik. Peneliti mengukur kesuksesan diskursus tersebut dengan memperhatikan klaim ketepatan, klaim kebenaran, dan klaim kejujuran dalam diskursus ala Habermas. (Nurfathiyah, 2021). Sementara itu, penelitian lainnya dari Abdul Rahman, Muhammad Syukur, dan Rifal tentang pelestarian lingkungan melalui partisipasi petani di Bulutellue menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan berangkat dari kesadaran masyarakat sendiri tanpa berharap pada keterlibatan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diskursus maupun tindakan ekologis berangkat dari pengetahuan dan pengalaman ekologis masyarakat lokal sendiri (Abdul, 2020).

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada diskursus ekologis yang mengarahkan kepada kesepemahaman dalam diskursus ekologis. Kesepemahaman ini berimplikasi pada tindakan kolektif masyarakat dalam menjawab krisis ekologi dewasa ini. Diskursus ekologis bertujuan untuk membangkitkan kesadaran ekologis warga di tengah krisis ekologi dewasa ini. Selain itu, ruang publik juga Habermas berpotensi untuk menjadi wadah diskursus di tengah kompleksitas kehidupan modern, termasuk di tengah perbedaan cara pandang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yakni metode kualitatif melalui analisis kepustakaan yang mendalam. Peneliti mencari dan mendalami berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang relevan. Penulis mengakses berbagai data yang akurat dan menguraikannya secara mendalam.

Penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis secara mendalam konsep ruang publik Jurgen Habermas sebagai wadah diskursus ekologis. Peneliti mengolah berbagai sumber yang relevan dengan tema serta me.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis literatur secara mendalam dan sistematis. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan teori ruang publik Jurgen Habermas dan isu-isu ekologis kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi tema, serta kontribusinya terhadap kerangka analisis penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pokok, seperti konsep ruang publik, diskursus komunikatif, partisipasi masyarakat, dan kesadaran ekologis. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya membangun landasan teoritis yang kuat sebagai pijakan dalam memahami hubungan antara ruang publik dan wacana ekologis (Zed, 2008).

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai gagasan dari sumber-sumber yang telah dikaji secara kritis (Zed, 2008). Penelitian ini menempatkan konsep ruang publik Jurgen Habermas sebagai kerangka utama untuk menelaah bagaimana ruang dialog yang rasional dan partisipatif dapat menjadi wadah bagi berkembangnya diskursus ekologis di tengah masyarakat. Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif teoritis guna menemukan keterkaitan antara komunikasi publik, kesadaran lingkungan, dan pembentukan opini publik mengenai isu ekologis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi teori Habermas dalam konteks tantangan ekologis masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-

kritis dalam menyoroti potensi ruang publik sebagai medium transformasi kesadaran ekologis masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Konsep pemikiran ruang publik Habermas

Jurgen Habermas adalah filsuf asal Jerman yang lahir pada tanggal 18 Juni 1929, di kota Gummersbach, Jerman, yang berada di Rhine – Westphalia Utara sekitar 40 mil dari Dusseldorf (Hugh Baxter, 2011). Karya Habermas yang berjudul *Strukturwandel der Offentlichkeit* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* pada tahun 1989 merupakan karya utama yang membahas konsep ruang publik. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai wilayah kehidupan sosial tempat terbentuknya opini publik. Ruang publik berangkat dari perbincangan individu-individu yang membentuk publik. Ruang publik merupakan tempat (space) atau wadah aspirasi masyarakat dalam membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan bersama yang dapat menjadi kritik dan tekanan politis sehingga terwujud perubahan dalam kehidupan bersama. Ruang publik terwujud ketika individu-individu dalam ruang publik menjalin komunikasi yang dialogis dan setara. Sastrapratedjam mendefinisikan ruang publik Habermas sebagai ruang yang menghubungkan apa yang ada di dalam diri (*Idion*) dengan apa yang kolektif (*koinon*) melalui komunikasi timbal balik yang setara. Perbincangan sehari-hari mempertautkan yang menjadi kepentingan privat dengan yang menjadi kepentingan bersama (Siti Murtiningsih et al 2024). Pertautan itu terjadi dalam ruang publik. Karena itu, Habermas mengungkapkan beberapa indikator bagi ruang publik yang ideal. Pertama, ruang publik bersifat inklusif. Ruang publik bersifat inklusif memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang yang mau mengambil bagian dalam diskursus. Ruang publik juga tidak terpusat pada salah satu wilayah teritorial tertentu, melainkan tersebar dalam masyarakat. Ruang publik bersifat majemuk. Kedua, kesetaraan partisipan. Setiap individu yang terlibat dalam diskursus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendegar. Ruang publik menjamin kesetaraan dalam keterlibatan atau tidak ada satu pihak tertentu yang menghalangi peserta lain untuk berbicara. Setiap peserta juga memiliki kesempatan untuk mengutarakan keinginan individualnya sejauh itu didesaian dan dibahasakan dalam konteks kehidupan bersama. Ketiga, bebas dari dominasi. Individu yang terlibat dalam diskursus bebas dari berbagai paksaan atau dominasi yang bukan kehendak pribadinya. Peserta mengutarakan argumentasinya dengan bebas tanpa paksaan. Peserta juga memiliki kehendak bebas untuk menyatakan setuju, tidak, atau pun netral terhadap suatu argumentasi lainnya yang ditawarkan oleh peserta lain (Hardiman, 2009). Ruang publik ini merupakan wadah yang tumbuh dari kehidupan masyarakat sendiri yang bertujuan mempertentangkan dan mempertautkan berbagai ide terhadap persoalan tertentu dalam masyarakat. Masyarakat sendiri yang memproduksi dan terlibat dalam ruang publik.

Pemikiran Habermas tentang ruang publik sangat relevan untuk menjadi kerangka normatif dalam mendiskusikan krisis lingkungan hidup dewasa ini. Krisis lingkungan hidup yang kian kompleks menuntut tanggung jawab kolektif. Keterlibatan semua elemen dalam kehidupan bersama, seperti masyarakat, masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, ahli dan pakar lingkungan hidup menjadi penting untuk memperoleh solusi yang berkelanjutan.

John Dewey mendefinisikan publik adalah individu atau kelompok yang terkena dampak dari konsensus. Setiap orang atau kelompok yang terdampak mengambil bagian secara setara dalam diskursus, sehingga konsensus mewakili kepentingan bersama yang seimbang (Pauline Johnson, 2001). Keterlibatan semua elemen dalam menganalisis dan mendiskusikan persoalan lingkungan hidup akan menghasilkan konsensus yang ideal yang tidak merugikan kehidupan bersama atau elemen tertentu. Partisipasi akan membantu masyarakat untuk memiliki komitmen pribadi dan kolektif dalam berperilaku yang berpihak kepada lingkungan.

B. Ruang publik Habermas menuju ruang hijau

Habermas menjelaskan ruang publik sebagai medium terbentuknya opini publik dalam kehidupan sosial masyarakat. Ruang publik berakar pada komunikasi antar individu yang membentuk publik, dimana individu-individu mendiskusikan kepentingan-kepentingan bersama dalam masyarakat. Diskursus dalam ruang publik bertujuan untuk mencapai kesepakatan terhadap suatu isu bersama (Siti Murtiningsih et al., 2024). Ruang publik ideal yang bersifat inklusif, adanya kesetaraan partisipan, serta bebas dominasi memungkinkan setiap orang berpartisipasi aktif untuk membahas persoalan bersama hingga terwujudnya kesepakatan (Hardiman, 2009).

Keterlibatan setiap elemen dalam ruang publik memungkinkan kontrol dan solusi yang bersifat holistik. Solusi tersebut harus berangkat dari keterlibatan yang setara serta mengarah pada konsensus yang berangkat dari kesepakatan. Dalam krisis lingkungan, konsensus harus mengarah kepada cara pandang dan tindakan yang berkelanjutan. Keberhasilan mengatasi krisis lingkungan hidup harus didasarkan pada pendekatan lintas disiplin, pembangkitan pengetahuan bersama, dan keterlibatan publik. Keterlibatan publik merupakan jalur baru menuju masa depan yang berkelanjutan (Salsabila et al., 2023).

Keterlibatan publik telah berperan penting dalam mencegah atau pun mengatasi kerusakan lingkungan hidup dewasa ini. Irlandia menjadi salah satu contoh negara yang memanfaatkan keterlibatan publik dalam mendiskusikan persoalan lingkungan hidup. Irlandia melibatkan Empat kantor Aksi Iklim Regional dengan 31 komunitas lokal yang dimanfaatkan untuk keterlibatan publik di tingkat regional dan lokal. Proses deliberasi yang melibatkan warga seperti Citizens' Assemblies (Majelis Warga) yang digunakan untuk membahas isu-isu beragama termasuk isu perubahan iklim yang ekstrem. Dalam konteks Irlandia, Citizens' Assemblies digunakan untuk mempercepat proses perubahan, melompat ke masa depan menuju aksi iklim yang efektif dan transformatif (Salsabila et al., 2023). Contoh seperti ini memperlihatkan pentingnya keterlibatan warga dalam diskursus ekologis.

Ruang publik Habermas akan menjadi ruang hijau, ruang diskursus ekologis, dimana keterlibatan individu mendapat tempatnya. Setiap orang atau kelompok yang terlibat dalam diskursus memiliki hak yang sama untuk menyampaikan argumentasinya dan tidak seorang pun boleh menolak. Argumentasi yang didasari rasionalitas yang kuat atau pengalaman eksistensial manusia dengan lingkungan akan menjadi jembatan dalam diskursus. Ruang publik hijau juga dapat menjadi wadah ideal bagi setiap orang atau kelompok untuk mengidentifikasi diri mereka dengan lingkungan.

C. Manfaat keterlibatan publik dalam diskursus ekologis

Keterlibatan masyarakat dalam diskursus ekologis sangat penting untuk membangkitkan kesadaran ekologis serta menghasilkan konsensus yang komprehensif. Gerakan seperti gerakan *Friday for Future* yang mendesak pemerintah untuk serius menanggapi krisis ekologis dengan mengaungkan darurat iklim serta menegaskan pentingnya keterlibatan publik untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan ideal merupakan bukti penting keterlibatan publik (Peter Eckersley et al., 2025). Desakan tersebut berakar pada kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini merupakan permasalahan yang dialami setiap manusia. Perubahan iklim yang ekstrem, penurunan keanekaragaman hayati yang meningkat merupakan fakta yang terjadi di depan mata dan dialami setiap orang. Krisis tersebut menyentuh manusia secara langsung. Pengalaman langsung seperti ini membangkitkan kesadaran bersama akan bahaya yang kian nyata serta menuntut pertanggungjawaban bersama melalui keterlibatan publik.

Keterlibatan publik memainkan peran penting dalam diskursus ekologis. Keterlibatan tersebut bukan sekedar tuntutan prosedural, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan ideal. *Pertama*, partisipasi publik memberikan argumen yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskursus. Pengalaman dan pengetahuan masyarakat akan menjadi masukan yang ideal dan penting bagi pertimbangan dalam merumuskan konsensus. Partisipasi masyarakat dalam diskursus ekologis menghadirkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terabaikan. Diskursus ini menjadi wadah ideal bagi masyarakat untuk mendiskusikan

kepentingan-kepentingan yang terabaikan seperti hak masyarakat adat. *Kedua*, partisipasi publik melalui ruang publik memberikan legitimasi sosial bagi konsensus atau kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat melalui ruang publik bukan sekedar mekanisme prosedural, melainkan legitimasi sosial bagi suatu kebijakan karena melibatkan semua masyarakat. Semua individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kebutuhan dan tuntutan yang diakomodasi dalam suatu kebijakan. Kebijakan lahir dari konsensus bersama yang setara dan ideal dalam ruang publik (Nicola Sharman, 2023). *Ketiga*, keterlibatan publik meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat. Cen dan Han menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diskursus ekologis dapat meningkatkan keadaban masyarakat akan lingkungan, memobilisasi berbagai hal untuk menangani konflik kepentingan, mengontrol perilaku perusahaan yang tidak berpihak kepada lingkungan serta mengontrol pemerintah dalam pelaksanaan program (Jin Guo and Junhong Bai, 2019). Keterlibatan publik menjadi penting dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang kian kompleks. Kesadaran masyarakat berdampak pada perilaku masyarakat yang berpihak pada lingkungan. Melalui ruang publik, kesadaran ekologis tidak hanya bersifat personal melainkan kolektif.

Krisis lingkungan hidup dewasa ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab dinyatakan dalam tindakan kolektif yang berpihak pada lingkungan. Tanggung jawab tersebut pertama-tama dinyatakan dalam keterlibatan perumusan dan perwujudan lingkungan yang berkelanjutan. Keterlibatan publik bukan sekedar tuntutan prosedural demokrasi, melainkan bagian penting dari perwujudan lingkungan yang berkelanjutan.

D. Peluang dan tantangan ruang publik modern sebagai ruang publik ekologis

Ruang publik modern memiliki peluang sebagai wadah diskursus ekologis. Perkembangan media modern sangat membantu untuk membangkitkan kesadaran ekologis secara kolektif. Jangkauan yang luas serta inklusivitas ruang publik modern dapat menjadi wadah diskursus ekologis yang ideal. Akan tetapi, peredaran informasi yang tidak terkontrol serta ketiadaan penyaringan informasi membuat duplikasi informasi menjadi mudah dan tersebar cepat. Ruang publik modern dapat menjadi peluang besar bagi perwujudan ruang publik tetapi juga memiliki tantangan yang tak terhindarkan.

1. Peluang

Perkembangan media sosial sebagai platform komunikasi sangat cepat dan efisien dalam berkomunikasi atau bertukar informasi. Perkembangan ini juga menawarkan penyebaran informasi yang berbasis ekologis serta dapat membangun komunitas ekologis yang efisien dalam menanggapi persoalan lingkungan. Kampanye viral, hastag, dan gerakan online dapat membangkitkan kesadaran ekologis kolektif karena hampir setiap manusia modern terjaring dalam media online. Media sosial dapat menanggapi darurat ekologis lintas daerah serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam kehidupan bersama (Dinny, 2025). Media sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan keterlibatan dalam era modern. Keterlibatan masyarakat yang berbasis pada kerja sama lintas bidang seperti kerja sama masyarakat non-profesional dan profesional dalam bidang konservasi sangat membantu mewujudkan lingkungan hijau. Kerja sama lintas bidang sangat mungkin dalam era modern dengan menerjemahkan data ilmiah ke dalam bahasa sehari-hari masyarakat (Cecep Aminudin, 2020). Media sosial juga menjamin keterbukaan berbagai informasi tentang kebijakan dan data ekologis yang dapat menunjang diskursus yang mengarah pada perwujudan konsensus yang adil dan setara. Media sosial juga memberi peluang yang sama bagi setiap orang untuk terlibat dalam diskursus ekologis. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk berpartisipasi dalam diskursus ekologis melalui media sosial karena sifatnya yang menjangkau semua orang. Media sosial dalam era modern dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai persoalan tentang lingkungan hidup serta membangkitkan kesadaran ekologis dan partisipasi publik dalam mewujudkan lingkungan hijau. Akan tetapi, peluang ruang publik yang tergambar dalam media sosial mendapat tantangan serius terhadap kualitas informasi, secara khusus yang terjadi di Indonesia.

2. Tantangan

Perwujudan ruang publik ideal melalui media sosial modern memiliki tantangan serius terhadap kualitas diskursus dalam media sosial modern. Media sosial sebagai media interaksi antar individu atau kelompok masyarakat memproduksi konten berdasarkan kemauan pengguna media serta tidak adanya filtrasi dari pihak ketiga atau editor khusus. Penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian sangat mungkin terjadi bahkan sering terjadi karena kehilangan daya kritis dari masyarakat pengguna sendiri. Menurut hasil survey mastel memperlihatkan bahwa media sosial menjadi saluran penyebaran berita palsu tertinggi di Indonesia mencapai 87.50%.¹⁹ Penyebaran informasi palsu yang sering terjadi mengaburkan data ilmiah terhadap fenomena krisis lingkungan hidup. Ketiadaan data yang akurat terhadap fenomena lingkungan hidup mempengaruhi pemahaman terhadap persoalan lingkungan hidup. Pemahaman yang dangkal serta prematur berdampak pada keterlibatan dalam diskursus ekologis. Selain itu, ujaran kebencian yang sering terjadi juga mempengaruhi partisipasi publik terhadap persoalan lingkungan hidup. Masyarakat akan terlena pada penyebaran kebencian personal dan mengabaikan fenomena aktual krisis yang terjadi. Media sosial yang seharusnya menjadi medium diskursus berubah menjadi media ekspresi diri yang negatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Ruang publik Habermas sangat relevan dalam dunia modern untuk menjadi wadah diskursus ekologis. Habermas melalui ruang publik mengidealkan partisipasi publik sebagai dasar utama mewujudkan kesepemahaman dalam merumuskan konsensus. Dalam konteks ekologi, partisipasi ini menjadi dasar yang kokoh untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat dunia. Partisipasi bukan hanya terlibat dalam diskursus, melainkan mengambil bagian dalam mewujudkan konsensus sebagai tanggung jawab bersama. Dalam keadaan krisis ekologi yang kian parah serta kegagalan pemerintah mewujudkan demokrasi di Indonesia, apakah perwujudan ruang publik ekologis ini menjadi mungkin?

Rekomendasi

Keberadaan kita di dunia modern ini tidak terlepas dari pengaruh media sosial. Media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan cara pandang dan cara bertindak dalam melihat suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks ekologis, media sosial sebagai media dengan meminimalisir kekurangan yang terjadi. Peneliti menawarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan diskursus melalui media sosial seperti tik tok, youtube, instagram, facebook, dan berbagai media sosial lainnya. *Pertama*, meningkatkan literasi digital sejak dini bagi masyarakat bahkan masuk dalam program sekolah dasar dan menengah pertama. *Kedua*, mendidik anak-anak bangsa dalam kerangka berpikir kritis bukan semata-mata kesuksesan teknis seperti mendapatkan pekerjaan. *Ketiga*, membantu peran masyarakat lokal dalam meverifikasi data lokal terkait persoalan lingkungan hidup. *Keempat*, mendorong media dan organisasi ekologis yang terprogramkan serta menggunakan metode komunikasi yang berkelanjutan yakni konsisten peran serta referensi ilmiah yang jelas sehingga memungkinkan sirkulasi opini yang jelas dalam ruang publik modern. *Kelima*, mendukung dan mengedepankan podcast-podcast lingkungan hidup yang terbuka dan jujur dalam mengelola informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2025). Ribuan Masyarakat Adat Demonstrasi Menolak Proyek Geothermal di Poco Leok. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. <https://www.aman.or.id/news/read/2111>, diakses 21 Januari 2026.
- Aminudin, C. (2020). Peranan sains warga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 1(2), 22-30.
- Baxter, H. (2011). *Habermas: the discourse theory of law and democracy*. Stanford University Press.
- Dinny, D. R., Mag'lepy, C. A., Al Rasyid, R., Daiva, D. A., & Purwanto, E. (2025). Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Ekologis Berbasis Budaya Lokal di Komunitas Adat. *Interaction Communication Studies Journal*, 2(2), 16-16.
- Eckersley, P., Haupt, W., & Kern, K. (2025). Assessing the impact of Fridays for Future on climate policy and policymaking in German cities. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 27(3), 280-293.
- Guo, J., & Bai, J. (2019). The role of public participation in environmental governance: Empirical evidence from China. *Sustainability*, 11(17), 4696.
- Handayani, B., & Daherman, Y. (2020). Wacana kesetaraan gender: Kajian konseptual perempuan dan pelaku media massa. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 4(1), 106-121.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif*. PT Kanisius.
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
- Johnson, P. (2001). Habermas's search for the public sphere. *European Journal of Social Theory*, 4(2), 215-236.
- Murtiningsih, S., Wahyudi, A., Munir, M., Utami, R., Mahaswa, R. K., Sairah, A. R., ... & Panani, S. Y. P. (2024). *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*. UGM PRESS.
- Nurfathiyah, P. (2021). Ruang publik dan komunikasi dialogis orang rimba di taman nasional bukit dua belas Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 24(01), 1-11.
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30-43.
- Rahman, A., Syukur, M., & Rifal, R. (2020). Pelestarian Lingkungan Melalui Partisipasi Petani Dalam Pembentukan Ruang Publik Di Desa Bulutellue. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 297-304.
- Robert Cox, *Environmental Communication and the Public Sphere* (London: SAGE publication, 2010)
- Salsabila, L., Lodan, K. T., & Khairina, E. (2023). Public engagement impact on sustainable waste management in Indonesia: Examining public behavior. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(2), 158-178.
- Sharman, N. (2023). Objectives of public participation in international environmental decision-making. *International & Comparative Law Quarterly*, 72(2), 333-360.
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni antonio gramsci. *Jurnal Translitera*, 5(1), 11-33.
- Swarnawati, A., Saleh, A., Ginting, B., Soetarto, E., & Satria, A. (2018). Public Sphere and Dialogue Communication about Conservation in Kepulauan Seribu National Park. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).
- Vestergren, S., Bamberg, S., & Louis, W. (2024). Responding to the socio-ecological crisis: Activism and collective action. *Global Environmental Psychology*, 2, 1-13.

- Widiasanti, I., Rahmadani, S., Nur, D. A. Z., Nafi'atussalwa, N., Lestari, N. P., & Syaidah, S. (2025). Kesetaraan akses internet dan tantangan literasi digital di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19631-19637.
- World Meteorological Organization, *State of the Global Climate 2024* <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2024?>, diakses 12 Oktober 2025.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.